

ABSTRAK

Latar Belakang : Dari lima kabupaten dan kota di DIY, pada tahun 2018 sampai 2020 Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan angka kejadian dengue yang meningkat tajam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan sistem surveilans dengue, implementasi program G1R1J dan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian vektor G1R1J yang merupakan tiga strategi utama dalam pengendalian kasus DBD.

Metode : Menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan kelemahan dari atribut yang disesuaikan dengan pedoman dari Dirjen P2P Kemenkes RI pada sub-studi evaluasi sistem surveilans dan implementasi program G1R1J. Studi potong lintang digunakan dalam sub-studi partisipasi masyarakat terhadap program G1R1J, data dikumpulkan dari 237 rumah tangga dalam 23 kluster dusun di Kapanewon Wonosari yang dipilih dengan teknik PPS . Regresi logistik digunakan pada uji multivariat.

Hasil : Pada sub-studi evaluasi surveilans, atribut sistem surveilans di Kabupaten Gunungkidul tidak sederhana dalam pencatatan dan pelaporan. Ketersediaan serta pengelolaan data yang tidak stabil dan tidak berkualitas, serta pengirimannya laporan kasus yang tidak tepat waktu. Pada sub-studi evaluasi, implementasi program G1R1J tidak menyeluruh, pelaksanaan PJB yang tidak rutin, kurangnya pelatihan serta tidak adanya SOP pelaksanaan program G1R1J di masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari sub-studi dari partisipasi masyarakat di Kapanewon Wonosari, tidak ada asosiasi antara pengetahuan (p -value 0.322), sikap (p -value 0.725) dan perilaku (p -value 0.613) terhadap partisipasi pengendalian vektor melalui G1R1J.

Kesimpulan : Kecenderungan angka kasus DBD yang meningkat dari tahun 2018 sampai 2020 di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh kelemahan pada sistem surveilans dan implementasi program G1R1J. Rekomendasi yang paling baik dilakukan agar peningkatan kasus dapat dikendalikan di Kabupaten Gunungkidul adalah membangun jejaring dan membuat SOP yang jelas dalam pelaksanaan G1R1J. Selain itu, melengkapi format pelaporan dan menganalisa data epidemiologi yang baik agar dapat memprediksi KLB. Perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam menilai performa surveilans, program pengendalian vektor G1R1J dan partisipasi masyarakat yang berkesinambungan untuk mengendalikan DBD di Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci : Evaluasi, Surveilans DBD, G1R1J, Partisipasi

ABSTRACT

Background: Of the five districts and cities of DIY, Gunungkidul Regency is likely to have a substantial rise in dengue prevalence between 2018 and 2020. The purpose of this study is to pinpoint the shortcomings of the three primary strategies for reducing dengue cases: community participation in the G1R1J vector control program, G1R1J program implementation, and dengue surveillance system implementation.

Method: In the sub-study of the evaluation of the surveillance system and the implementation of the G1R1J program, a descriptive method was used to explain the weaknesses of the attributes and was adjusted to the guidelines. In the G1R1J program's community participation sub-study, the cross-sectional study was employed. 237 households in 23 clusters in the Wonosari Subdistrict, which were chosen using the PPS technique, provided the data. In multivariate tests, regression logistics data analysis is performed.

Results: The characteristics of the surveillance system in Gunungkidul Regency are not as straightforward as in defining dengue cases, documenting them, and reporting them, according to the surveillance evaluation sub-study. Availability, handling of erratic and unreliable data, and prompt case report dissemination. The implementation of PJB is not routine, there is insufficient training, and there are no SOPs for the implementation of the G1R1J program in the community of Gunungkidul Regency, according to the sub-study of the evaluation of the G1R1J program's implementation, which is not thorough. There was no correlation between knowledge (p-value 0.322), attitudes (p-value 0.725), and conduct (p-value 0.613) regarding vector control participation through G1R1J, according to a sub-study of community involvement in the Wonosari Subdistrict.

Conclusion: The surveillance system and the implementation of the G1R1J program, Kabupaten Gunungkidul had an increase in DBD cases between the years 2018 and 2020. The recommendation that would be most successful if carried out to allow for the end-to-end analysis of the case in Kabupaten Gunungkidul would be to build a jejaring and provide clear SOPs for G1R1J operations. Additionally, in order to be able to illustrate the escalation of a given case, epidemiological data must be properly organized and formatted and should be thoroughly examined. It is necessary to have monitoring and evaluation of surveillance performance, the vektor G1R1J program, and community participation in order to implement DBD in the Gunungkidul Regency.

Keywords: Evaluation, DHF Surveillance, G1R1J, Participation